

Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

Jl. dr. Setiabudi No. 3 Sragen, Telp. (0271) 891011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menyusun rencana program kerja dan sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dalam lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pekerjaan Umum.

Dengan tersusunnya Renstra, maka arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sragen yang telah dirumuskan. Adapun Visi yang ditetapkan adalah **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, semoga Renstra ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen.

Sragen, 16 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sragen



MARIJA ST. MM, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19620108 199803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum	14
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	37
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	42
6.1. Program dan Kegiatan	42
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026.....	51
BAB VIII PENUTUP	60
8.1. Kaidah Pelaksanaan	60
8.2. Pedoman Transisi	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen ini adalah dokumen kerja DPU untuk masa kerja lima tahun mendatang. Renstra ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diakomodir, dijabarkan dan mewarnai seluruh substansi dalam Renstra ini.

Proses penyusunan renstra ini juga mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dapat dilaksanakan secara efektif.

Secara konseptual, penyusunan Renstra mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra DPU ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra DPU sebagai landasan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi landasan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan program strategis dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dan Daerah. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD ini adalah menjadi dasar penilaian kinerja Kepala OPD dan menjadi acuan penyusunan LKjIP OPD.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Renstra DPU disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman, landasan dan dasar hukum dalam penyusunan renstra ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Kabupaten/Kota);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
 21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kasiba dan Lisiba BS;
 22. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Teknis Kasiba dan Lisiba BS;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016.), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);
29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen perencanaan bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra OPD ini adalah tersedianya dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Renstra ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Pekerjaan Umum.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan renstra DPU ini disusun mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga penyusunan Renstra ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) menjabarkan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV berisi tentang Tujuan dan Sasaran jangka Menengah OPD

Bab V menjabarkan mengenai Strategi dan Arah Kebijakan OPD.

Bab VI uraian mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VII diuraikan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan meliputi Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, bahwa kedudukan Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Adapun fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021, pembagian bidang kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
 - b. Kelompok Unsur Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - c. Kelompok Unsur Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan dan Bina Teknik
 - b. Kelompok Unsur Bangunan Gedung
 - c. Kelompok Unsur Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air
 - b. Kelompok Unsur Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - c. Kelompok Unsur Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
6. UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium
 - b. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Secara garis besar uraian tugas per unit kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Sedangkan Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan

- bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air (sda), sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Sedangkan Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;

- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Bina Teknik, Bangunan Gedung, dan Penyehatan Lingkungan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Pembinaan, Penyuluhan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya;

6. UPTD Peralatan Perbengkelan dan Laboratorium

UPTD Peralatan Perbengkelan dan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium;
- b. Pelayanan Pemeriksaan, Pemeliharaan, dan Penyewaan Alat Berat serta Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Mutu, meliputi: Pengadaan Alat Besar; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar; Pengoperasian Alat Berat; Pengujian Sample Agregat (Material Batu, Aspal); Uji Coba Mutu Kualitas Beton dan Aspal di Lapangan; Uji Coba Core Drill (Tes Ketebalan Beton dan Aspal); Pengujian Sandcone (Kepadatan Tanah) serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Peralatan, Perbengkelan, dan Laboratorium, dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

- a. Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, meliputi: Penyusunan Rencana, Strategi, dan Teknis; Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan/Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Sarana dan Prasarana IPLT serta Supervisi; Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Terpusat Skala Permukiman; Pembinaan Teknik/Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan SDM dan Kelembagaan terkait Penyediaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja; Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya OPD

- a. Potensi Kepegawaian
- Kondisi dan potensi kepegawaian yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen
SDM PNS

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1.	Kepala Dinas	1			
2.	Sekretaris	1			
3.	Kepala Bidang	3			
4.	Kasubbag	1	1		
5.	Kepala Seksi	3	5		
6.	Kepala UPTD		1		
7.	Fungsional Umum		63	112	9
Jumlah		9	70	112	9

SDM NON PNS

No	Penempatan	Jumlah
1.	Sekretariat	6
2.	Bidang Bina Marga	10
3.	Bidang Sumber Daya Air	5
4.	Bidang Tata Ruang	5
5.	UPTD Masaran	2
6.	UPTD Alat Berat	7
Total Jumlah		35

Tabel 2.2.
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sragen Menurut Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I / a	-	-	-
I / b	2	-	2
I / c	1	-	1
I / d	6	-	6
Jumlah	9	0	9
Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II / a	3	-	3
II / b	33	-	33
II / c	21	-	21
II / d	50	5	55
Jumlah	107	5	112
Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
III / a	27	9	36
III / b	8	7	15
III / c	9	2	11
III / d	6	2	8
Jumlah	50	20	70
Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV / a	3	3	6
IV / b	1	-	1
IV / c	1	-	1
IV / d	-	-	-
Jumlah	5	3	8

Tabel 2.3.
Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sragen Menurut Pendidikan Pegawai

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Lk	Pr	
Doktor (S3)	-	-	-
Magister (S2)	8	5	13
Sarjana (S1)	48	15	63
Diploma IV (D4)	2	-	2
Diploma III (D3)	7	3	10
Diploma II (D2)	-	-	-
Diploma I (D1)	-	-	-
SLTA	93	4	102
SLTP	7	-	7
SD	7	-	7
Jumlah	172	27	199

b. Sarana dan Prasarana

Nilai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Daftar Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Sragen

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Empat	unit	25
2.	Kendaraan Roda Tiga	unit	5
3.	Kendaraan Roda Dua	unit	61
4.	Pompa Air	unit	18
5.	Stamper	unit	1
6.	Beton Molen	unit	2
7.	Mesin Potong Rumput	unit	5
8.	Mesin Potong Rumput Dorong	unit	1
9.	Meet Roll	unit	7
10.	Skatemark	unit	2
11.	Backhoe Loader	unit	1
12.	Excafator	unit	2
13.	Tool Set	unit	2
14.	Pan Mixer	unit	2
15.	Vibrator Rammer	unit	1
16.	Vibrator Roller	unit	1
17.	UPS	unit	5
18.	Mesin Ketik	unit	2
19.	Meja Tulis Kayu	unit	56
20.	Mja Kayu	unit	2
21.	Meja Tamu	unit	5

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
22.	Meja Kerja	unit	5
23.	Meja 1/2 Biro	unit	41
24.	Meja Biro Kayu	unit	7
25.	Meja komputer	unit	28
26.	Kursi Kerja	unit	5
27.	Kursi Putar	unit	2
28.	Kursi Tamu	unit	1
29.	Kursi Lipat	unit	5
30.	Kursi Besi	unit	3
31.	Kursi Rapat	unit	1
32.	Kursi kerja	unit	2
33.	Filling kabinet	unit	49
34.	Rak Arsip	unit	3
35.	Almari Kayu	unit	1
36.	Almari Kaca	unit	3
37.	Almari Besi	unit	8
38.	Almari / loker	unit	1
39.	Almari 2 pintu	unit	1
40.	Almari buku	unit	1
41.	Almari Gambar	unit	2
42.	Komputer	unit	35
43.	Laptop	unit	20
44.	Printer	unit	23
45.	Scanner	unit	5
46.	Kelengkapan Komputer	set	1
47.	Jaringan Komputer	set	1
48.	AC	unit	11
49.	Faximili	unit	1
50.	Papan Luncur Kayu	unit	2
51.	GPS	unit	9
52.	Kamera	unit	15
53.	Handycam	unit	4
54.	Tripot Handycam	unit	1
55.	Proyektor	unit	5
56.	LCD Screen	unit	1
57.	Tape Recorder	unit	1
58.	Mesin potong kertas	unit	2
59.	Gerobak Tanggung	unit	1
60.	Mesin Pompa	unit	1
61.	Pompa Generator	unit	1
62.	Drum Mollen	unit	1
63.	Asp. Hal Sprayer	unit	1
64.	Comreter Vibrator	unit	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
65.	Grass Culter	unit	1
66.	Stom Wals	unit	10
67.	Tools Safersign	unit	1
68.	Trailer 2 Ton	unit	1
69.	Bulldozer	unit	1
70.	Rambu / bak ukur	unit	1
71.	Alat Laborat	unit	1
72.	Concret Test	unit	1
73.	TiangLPJU+stang 6 m	unit	4
74.	Angkong	unit	1
75.	Meja	unit	1
76.	Almari Katalog	unit	1
77.	Almari Perpust	unit	1
78.	Meja Podium	unit	1
79.	Meja Panjang	unit	1
80.	Sound Sistem	set	1
81.	HT & Accessories	set	2
82.	Jaringan internet	set	1
83.	Kunci pipa	unit	1
84.	Lamp Hias kmbr myng	unit	1
85.	Lampu hias kelapa	unit	1
86.	Lampu hias penjor	unit	1
87.	LPJU	unit	2
88.	Travo	unit	2
89.	Meja pimp	unit	1
90.	Mutasi dari Perlengkapan	unit	1
91.	Aplikasi program 1 set Handy talky	unit	1
92.	Radio base station	unit	1
93.	Radio Mobil KENWOOD	unit	1
94.	Handytalky KENWOOD	unit	1
95.	Antena Tower	unit	1
96.	OHF	unit	2
97.	Meja Gambar Besi	unit	1
98.	Meja Panjang Kayu	unit	2
99.	Rak Gambar Besi	unit	1
100.	Lemari Besi	unit	1
101.	Papan Lucur	unit	1
102.	Market Waaduk Ketro	unit	1
103.	Market B.W.Kd. Kancil	unit	1
104.	Meja Pingpong	unit	1
105.	Tiang Bendera	unit	1
106.	Papan White Board	unit	1
107.	Antena Tower	unit	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
108.	Podium	unit	1
109.	Monitor/display	unit	1
110.	Mesin jilid	unit	1
111.	Tabung Pemadam Kebakaran	unit	3
112.	Wireles Sound system	set	1
113.	Paper / mesin Binding + Spiralnya	unit	1
114.	Paper Cutter / Copy Kit 2000 R	unit	1
115.	Penghancur Kertas	unit	3
116.	White board double face 120x240 cm	unit	1
117.	Kursi kuliah (Citose MND)	unit	1
118.	Meja ukuran 180x70x75cm	unit	1
119.	White board 2 muka (90x180 cm)	unit	1
120.	Rak alat	unit	1
121.	Tempat tidur tingkat (100x200 cm)	unit	1
122.	Tempat tidur (120x200 cm)	unit	1
123.	Almari pakaian	unit	1
124.	Kursi dan meja makan 8 orang	unit	3
125.	Kasur busa T.18 cm (100x200 cm)	unit	1
126.	Spring bed central (120x200 cm)	unit	1
127.	Sprei	unit	1
128.	Mesin wireless,sound system	set	1
129.	Dial Thermometers 0 - 300 C	unit	1
130.	Erlenmeyer	unit	1
131.	Concret Cube Mold	unit	1
132.	Concrete Cylinder Mold	unit	1
133.	Chain Saw Still	unit	2
134.	Wireless Presenter	unit	1
135.	Compression Machine	unit	1
136.	Standar Penetration Test	unit	1
137.	Gergaji Kayu	unit	1
138.	Mesin Absensi Sidik Jari	unit	2
139.	Overhead dan Crane	unit	1
140.	Laser Rangerfinder	unit	1
141.	Leica Distometer	unit	1
142.	Hummer Test	unit	1

2.3 Kinerja pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan sasaran/target Renstra 2016-2021 dapat digambarkan pada Tabel 2.5 berikut ini, sedangkan capaian kinerja OPD berdasarkan target IKK disajikan pada Tabel 2.6. untuk capaian kinerja berdasarkan anggaran disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Target Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SEKRETARIAT																				
1	Prosentase Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase perijinan kendaraan dinas/operasional	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase jasa administrasi keuangan	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase jumlah jasa kebersihan kantor	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	-	-	-	22	22	46	46	46	22	22	46	46	46	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase jumlah Alat Tulis Kantor	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase jumlah barang cetakan dan penggandaan	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prosentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	-	-	-	4	11	61	128	-	4	11	61	128	0%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah surat kabar	buah	-	-	-	-	-	360	360	360	-	-	360	360	360	0%	0%	100%	100%	100%
11	Prosentase jumlah belanja makanan dan minuman	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Prosentase kegiatan rapat koordinasi ke luar daerah	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah pegawai tidak tetap pemadam kebakaran	orang	-	-	-	-	-	31	31	33	-	-	31	31	33	0%	0%	100%	100%	100%
15	Jumlah Kendaraan Angkutan Darat	unit	-	-	-	-	-	12	5	27	-	-	12	5	27	0%	0%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Jumlah Mebeleir	unit	-	-	-	-	2	-	36	121	-	2	-	36	121	0%	100%	0%	100%	100%
17	Prosentase Pemeliharaan Gedung Kantor	%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan/ Operasional	unit	-	-	-	29	29	29	31	31	29	29	29	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah pakaian kerja lapangan	stel	-	-	-	470	363	61	38	2	470	363	61	38	2	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah alat-alat berat	unit	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	0%	0%	0%	0%	100%
22	Jumlah alat ukur dan bahan lab. Kebinamargaan	unit	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	0%	0%	0%	0%	100%
23	Jumlah alat berat yang direhabilitasi	unit	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	4	-	1	0%	0%	100%	0%	100%
PERENCANAAN																				
	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	dok									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Jumlah dokumen masterplan penataan reklame	Dok									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah dokumen RTBL	Dok									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah dokumen Peta sebaran dan area lahan basah (sawah) di Kabupaten Sragen	Dok									n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a
4	Jumlah dokumen Peta sebaran dan area kawasan permukiman di Kabupaten Sragen	Dok									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (*)	Lokasi									-	16	132	173	128	-	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi ijin pemanfaatan ruang (*)	Lokasi									40	50	67	271	401	100	100	100	100	100
	Tertatanya wilayah perbatasan	lokasi									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Tersusunnya dokumen dan DED perencanaan daerah perbatasan	Dok									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Terbangunnya tugu batas antar kabupaten	unit									n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
BINA MARGA																				
1	- Pelayanan yang lancar dan aman pada infrastruktur jalan dan jembatan	%	100	100	-	-	-	-	-	-	55,76	60,75	64,50	69,97	71,78	100	108,9	106,2	108,5	102,6
	Antar Kecamatan, Lintas Perbatasan, Lintas Desa dan Perkotaan.																			
2	- Menjaga umur layanan jalan dan jembatan dapat bertahan lama juga aman	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PENGAIRAN																				
1	Jumlah jaringan irigsai yang direhab	Lokasi																		
		Lokasi				22	10	25	14	30	22	10	25	26	24					
		D I				74	9	10	35	20	60	9	10	39	20					
		Lokasi				4	4	6	4	4	4	4	6	4	4					
		Lokasi				0	0	1	0	3	0	0	1	0	1					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan																		
						0	0	2	0	0	1	0	0	0	0					
						0	0	1	0	0	1	0	0	0	0					
3	Jumlah lokasi tebing yang dibangun	Lokasi																		
						0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					
						0	0	0	0	4	0	0	0	1	0					
						0	1	1	0	0	0	1	0	0	3					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Jumlah Luas layanan Lokasi Aset																			
	Luas layanan Lokasi aset	Ha				300	0	0	0	0	300	0	0	0	0					
	0	lokasi																		
	Jumlah Sumur dalam yang dibangun dan monitoring lokasi Pengambilan Air Tanah	lokasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Jumlah jaringan irigasi yang direhab	Lokasi																		
CIPTA KARYA																				
	Meningkatnya Persentase gedung instansi pemerintah dalam kondisi baik																			
1	Terbangunnya gedung kantor	unit				-	-	1	3	2	1	-	-	3	2	1	1	1	1	1
	Presentase lingkungan RD Bupati yang tertata	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah kantor kecamatan yang direvitalisasi	unit				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	Jumlah rumah dinas terbangun	unit				-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	Meningkatnya Jumlah penduduk yang mengakses layanan air bersih pedesaan	jiwa				NA	NA	NA	NA	NA	93.860	94.408	99.208	101.208	103.608					
	Meningkatnya Jumlah penduduk yang mengakses jaringan limbah domestik perpipaan	jiwa				NA	NA	NA	NA	NA	3.960	5.972	8.932	12.124	14.156					
	Meningkatnya Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%				NA	NA	NA	NA	NA	50	51	52	53	54					
	Meningkatnya Luas ruang terbuka hijau perkotaan yang tertata	m2				NA	NA	NA	NA	NA	-	-	-	-	13.000					
	Meningkatnya Luas kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	m2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tertatanya kawasan permukiman kumuh perkotaan	m2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 6. Review Capaian Program dan Kegiatan Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SEKRETARIAT																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan dan tertib administrasi																
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar perijinannya	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang terbayar jasa keuangannya	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang tercukupi jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	unit	22	22	46	46	46	22	22	46	46	46	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan yang tercukupi Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan yang tercukupi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	4	11	61	128	-	4	11	61	128	0%	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	buah	-	-	360	360	360	-	-	360	360	360	0%	0%	100%	100%	100%
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah belanja makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi	kali	7	7	12	12	12	7	7	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah pegawai tidak tetap pemadam kebakaran	OB	-	-	31	31	33	-	-	31	31	33	0%	0%	100%	100%	100%
14	Penyedia jasa tenaga pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan pemadaman kebakaran	OK	-	-	108	153	116	-	-	108	153	116	0%	0%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Jumlah sarana dan prasarana aparatur																
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Angkutan Darat	unit	-	-	12	5	27	-	-	12	5	27	0%	0%	100%	100%	100%
16	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleir	unit	-	2	-	36	121	-	2	-	36	121	0%	100%	0%	100%	100%
17	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional	unit	29	29	29	31	31	29	29	29	31	31	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Jumlah pakaian kerja lapangan																

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	stel	470	363	61	38	2	470	363	61	38	2	100%	100%	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kebinamargaan		-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	0%	0%	0%	0%	100%
20	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat-alat berat	unit	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	0%	0%	0%	0%	100%
21	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan lab. kebinamargaan	Jumlah alat ukur dan bahan lab. Kebinamargaan	unit	-	-	4	-	1	-	-	4	-	1	0%	0%	100%	0%	100%
22	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang direhabilitasi	unit	-	-	4	-	1	-	-	4	-	1	0%	0%	100%	0%	100%
TATA RUANG																		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen masterplan penataan reklame	Dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen RTBL	Dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen Peta sebaran dan area lahan basah (sawah) di Kabupaten Sragen	Dok	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a
		Jumlah dokumen Peta sebaran dan area kawasan	Dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		permukiman di Kabu. Sragen																
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Ruang	Jumlah rekomendasi ijin pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Lokasi	-	16	132	173	128	-	16	132	173	128	-	100	100	100	100
		Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi ijin pemanfaatan ruang	Lokasi	40	50	67	271	401	40	50	67	271	401	100	100	100	100	100
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tertatanya wilayah perbatasan	lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan	Tersusunnya dokumen dan DED perencanaan daerah perbatasan	Dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Pembangunan tugu batas kabupaten	Terbangunnya tugu batas antar kabupaten	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
BINA MARGA																		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																	
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan.	Pembangunan Jembatan	Unit	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	100,00	-	-
2	Peningkatan Jalan dan	Peningkatan Jalan	Km															

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jembatan.																	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																	
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan se Kab. Sragen	km	118,35	84,23	154,55	305,77	100,00	118,35	84,23	154,55	305,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Pemeliharaan Rutin Jalan, Bahu Jalan dan Drainase	Pemeliharaan Rutin Jalan, Bahu Jalan																
		dan Drainase se - Kab. Sragen.	km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMBER DAYA AIR																		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah jaringan irigsai yang direhab	Lokasi															
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Lokasi	22	10	25	26	24	22	10	25	26	24					
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah dibangun		D I	60	9	10	39	20	60	9	10	39	20					
	Desain/Konstruksi Partisipatif		Lokasi	4	4	6	4	4	4	4	6	4	4					
	Program Pengembangan , Pengelolaan Konservasi Sungai Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya																	

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembangunan Embung		Lokasi	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1					
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan															
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Perda Irigasi)			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
	Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
	Program Pengendalian Banjir	Jumlah lokasi tebing yang dibangun	Lokasi															
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir			0	0	1	0	0	0	0	1	0	0					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai			0	0	0	1	0	0	0	0	1	0					
	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali			0	1	0	0	3	0	1	0	0	3					
	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya		lokasi															

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Alam																	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah Sumur dalam yang dibangun dan monetoring lokasi Pengambialan Air Tanah	lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemakaian Air Tanah			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
CAIPTA KARYA																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Persentase gedung instansi pemerintah dalam kondisi baik																
	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor	unit	1	-	-	3	2	1	-	-	3	2	1	1	1	1	1
	Penataan lingkungan dan fas penunjang RD Bupati	Presentase lingkungan RD Bupati yang tertata	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	Revitalisasi kantor kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang direvitalisasi	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas terbangun	unit	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya Jumlah penduduk yang mengakses layanan air bersih pedesaan	jiwa	93.860	94.408	99.208	101.208	103.608	93.860	94.408	99.208	101.208	103.608					
		Meningkatnya Jumlah penduduk yang mengakses jaringan limbah domestik perpipaan	jiwa	3.960	5.972	8.932	12.124	14.156	3.960	5.972	8.932	12.124	14.156					

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-2	Meningkatnya Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	50	51	52	53	54	50	51	52	53	54					
	Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Luas ruang terbuka hijau perkotaan yang tertata	m2	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	13.000					
	Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Luas kawasan kumuh perkotaan yang tertangani		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Tertatanya kawasan permukiman kumuh perkotaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 7. Review Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sragen

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
SEKRETARIAT																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	195.000.000	175.000.000	198.840.000	270.200.000	429.600.000		126.304.453	157.961.040	259.065.500	332.192.781		72,17%	79,44%	95,88%	77,33%	50.745.600	43.776.188,70
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	N/A	14.340.000	20.000.000	30.000.000	46.000.000		8.787.625	12.383.750	20.871.525	29.615.650		61,28%	61,92%	69,57%	64,38%	5.517.000	3.582.927,50
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	N/A	N/A	7.500.000	80.720.000	124.540.000		N/A	7.500.000	15.720.000	96.343.375			100,00 %	19,47%	77,36%	14.184.000	7.970.891,67
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.541.000	15.000.000	7.450.000	16.964.500	38.604.500		9.713.000	7.130.000	16.482.000	37.914.000		64,75%	95,70%	97,16%	98,21%	3.422.400	3.561.950,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.400.000	12.100.000	10.000.000	16.910.000	45.970.000		10.200.000	10.000.000	16.025.000	45.084.500		84,30%	100,00 %	94,77%	98,07%	3.575.200	4.065.475,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	25.500.000	25.500.000	25.325.000	25.369.500	60.369.500		25.500.000	25.325.000	25.369.000	57.784.675		100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,72%	6.482.560	6.698.933,75
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.750.000	27.500.000	21.800.000	22.882.500	52.892.500		17.696.800	21.800.000	22.882.500	50.892.500		64,35%	100,00 %	100,00 %	96,22%	5.553.000	5.663.590,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	15.500.000	12.500.000	13.125.000	28.125.000		11.615.000	12.500.000	10.532.500	23.805.500		74,94%	100,00 %	80,25%	84,64%	2.890.000	2.922.650,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	7.500.000	275.025.000	205.970.000	273.470.000		7.500.000	247.393.300	205.454.780	273.470.000		100,00 %	89,95%	99,75%	100,00 %	38.098.250	36.690.904,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	2.040.000	2.040.000	4.320.000			1.800.000	2.040.000	2.550.000			88,24%	100,00 %	59,03%	560.000	426.000,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	12.719.000	54.825.000	75.082.500	176.792.500		8.112.000	52.448.000	75.082.500	132.640.000		63,78%	95,66%	100,00 %	75,03%	13.176.760	13.414.125,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000	7.000.000	15.080.000	15.000.000	34.000.000		560.000	11.585.200	15.000.000	20.805.000		8,00%	76,82%	100,00 %	61,19%	3.123.200	2.397.510,00
13	Penyediaan jasa perkantoran	71.500.000	71.500.000	90.000.000	136.800.000	508.800.000		5.500.000	90.000.000	136.800.000	451.135.000		7,69%	100,00 %	100,00 %	88,67%	35.144.000	34.171.750,00
14	Penyedia jasa tenaga pemadam kebakaran	N/A	17.000.000	N/A	N/A	128.700.000		14.690.850	N/A	N/A	119.700.000		86,42%			93,01%	14.570.000	13.439.085,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana																	

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Aparatur																	
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	N/A	5.000.000	706.800.000	2.017.700.000			5.000.000	639.965.000	2.017.700.000			100,00 %	90,54%	100,00 %		181.966.667	177.511.000,00
16	Pengadaan mebeleur	N/A	7.500.000	N/A	30.000.000	76.250.000		7.500.000	N/A	30.000.000	76.250.000		100,00 %		100,00 %	100,00 %	7.583.333	7.583.333,33
17	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	N/A	32.929.000	35.000.000	40.040.000	90.040.000		29.320.000	32.572.500	40.026.000	68.364.500		89,04%	93,06%	99,97%	75,93%	9.900.450	8.514.150,00
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	194.000.000	301.917.000	423.900.000	497.800.000	932.300.000		237.615.250	417.881.699	378.785.000	813.540.420		78,70%	98,58%	76,09%	87,26%	93.996.680	92.391.118,45
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
19	Pengadaan pakaian kerja lapangan	39.950.000	16.335.000	15.695.000	17.100.000	11.000.000		15.427.500	15.616.000	16.720.000,00	11.000.000		94,44%	99,50%	97,78%	100,00 %	4.003.200	2.938.175,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan																	
20	Pengadaan alat-alat berat	N/A	N/A	N/A	1.385.600.000	N/A		N/A	N/A	1.385.600.000,00	N/A				100,00 %		277.120.000	277.120.000,00
21	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan lab.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A							

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	kebinamargaan																	
22	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	N/A	N/A	190.000.000	N/A	N/A		N/A	170.327.000	N/A	N/A			89,65%			38.000.000	34.065.400,00
TATA RUANG																		
	Program Perencanaan Tata Ruang																	
1	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan																	
2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan																	
	Program Pemanfaatan Ruang																	
3	Survey dan pemetaan				120.000.000					118.302.000					98,59		24.000.000	23.660.400,00
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																	
4	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Ruang		60.000.000	75.000.000	100.000.000	121.500.000		58.836.000	74.817.500	97.842.500	116.063.500		98,06	99,76	97,84	95,53	17.825.000	17.377.975,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																	
5	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan																	
6	Pembangunan tugu batas kabupaten																	
BINA MARGA																		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																	
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan.	0	4.605.000.00	2.400.000.00	3.473.000.00	9.473.650.00	0	3.889.110.00	2.395.000.00	3.418.987.00	13.780.850.000	0	84,45	99,79	98,44	145,47	798.066.000	939.357.880,00
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																	
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	33.762.000.000	114.718.400.000	52.684.970.000	160.081.730.000	238.734.330.000	24.449.000.000	93.342.270.000	51.440.470.000	157.485.351.000	233.800.070.000	72	81,37	97,64	98,38	97,93	23.999.257.200	22.420.686.440,00
4	Pemeliharaan Rutin	5.185.000.0	4.500.000.0	5.000.000.0	5.900.000.0	5.502.600.0	5.180.000.0	3.889.110.0	4.869.690.0	5.418.732.6	4.560.900.0	100	86,42	97,39	91,84	82,89	1.043.504.000	956.737.306,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Jalan	00	00	00	00	00	00	00	00	50	00							
SUMBER DAYA AIR																		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.330.810.00																
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.400.810.00	5.462.500.00	6.974.107.00	6.536.684.00	6.852.220.00	6.210.152.100	4.157.841.00	4.239.653.500	6.463.005.950	6.797.638.000	1	0,76	0,61	0,99	0,99	1.289.052.840	1.114.731.622,00
2	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah dibangun	1.700.000.00	646.500.000	820.000.000	1.400.000.00	1.053.028.00	1.662.388.240	642.242.876	799.828.895	1.387.515.600	1.036.096.000	1	0,99	0,98	0,99	0,98	224.781.120	221.122.864,44
3	Desain/Konstruksi Partisipatif	230.000.000	502.500.000	200.470.000	922.020.000	942.000.000	229.673.000	398.216.653	157.648.190	785.379.445	876.301.091	1	0,79	0,79	0,95	0,93	111.879.600	97.888.735,16
4	Monitpring Evaluasi		125.000.000					93.812.500					0,75				25.000.000	18.762.500,00
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya																	
5	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan			249.500.000		2.030.000.00			118.464.500		44.608.000			0		0	227.950.000	16.307.250,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Bangunan Penampung Air Lainnya																	
	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	394.597.000																
6	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- undangan (Perda Irigasi)	250.000.000					-					-					50.000.000	-
	Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	144.597.000					144.244.500					1					28.919.400	28.848.900,00
	Program Pengendalian Banjir																	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir			75.000.000					73.593.000					1			15.000.000	14.718.600,00
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan			200.000.000	450.000.000	906.000.000			193.545.000	443.496.250	-			1	1		103.733.333	42.469.416,67

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Tanggul Sungai																	
9	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali		600.000.000					434.344.000					1				120.000.000	86.868.800,00
10	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai					150.000.000											30.000.000	#DIV/0!
11	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai										-							
	Program Pengembangan Data/Informasi																	
12	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan				75.000.000					73.405.000					1		15.000.000	14.681.000,00
	Program Perlindungan dan Konservasi																	

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Sumber Daya Alam																	
13	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA				20.000.000	600.000.000				19.985.500	-				1		62.000.000	1.998.550,00
14	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemakaian Air Tanah					20.000.000					19.988.000						4.000.000	3.997.600,00
CIPTA KARYA																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pembangunan gedung kantor	0	0	2.700.000.000	7.334.431.000	6.754.662.500	0	0	2.694.400.000	7.192.421.800	6.633.930.000						671.563.740	660.830.072,00
2	Penataan lingkungan dan fas penunjang RD Bupati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
3	Revitalisasi kantor kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
4	Pembangunan Rumah Dinas	0	0	0	207.500.000	5.977.200.000	0	0	0	201.900.000	5.543.586.000						247.388.000	229.819.440,00
	Program Pembangunan Infrastruktur	1.319.081.000	2.093.750.000	2.185.280.000	4.452.785.000	3.805.512.600	1.271.379.000	1.766.938.000	2.088.595.000	4.321.519.600	3.676.907.000						554.256.344	525.013.544,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20
	Perdesaan																	
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-2	23.000.000	420.000.000	462.000.000	1.055.000.000	780.500.000	21.080.000	406.486.000	449.956.000	1.006.886.000	757.067.000						109.620.000	105.659.000,00
	Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	0	0	0	2.052.500.000	4.175.000.000	0	0	0	1.970.397.000	4.112.038.400						249.100.000	243.297.416,00
	Program Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
5	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisis SWOT, yang merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T), yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor – faktor luar (O dan T) dan faktor didalam perusahaan (S dan W). Kata – kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur – unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur – unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

1. Analisis Faktor Internal

Analisis faktor internal dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan – kekuatan (Strengths) dan Kelemahan – kelemahan (Weakness). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan sarana prasarana dinas pekerjaan umum;
- 2) Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan;
- 3) Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program pembangunan, rekonstruksi, revitalisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan, dalam penanganan konstruksi;
- 4) Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum di perkotaan dan pedesaan;
- 5) Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung dari pemerintah pusat;
- 6) Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Sragen;
- 7) Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
- 8) Adanya penyebaran informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Keterbatasan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan Jalan dan Jembatan;
- 3) Masih terdapat ruas jalan kabupaten yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/ jembatan terganggu;
- 4) Belum optimalnya pelayanan air bersih dan sanitasi di perkotaan maupun pedesaan;
- 5) Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak di perkotaan maupun pedesaan;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
- 7) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi;
- 8) Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi;
- 9) Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
- 10) Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi

2. Analisa Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang – peluang (opportunities) dan ancaman – ancaman (threats) yang ada, terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro sebagai berikut :

a. Peluang (opportunity)

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- 2) Adanya alokasi dana APBN melalui dana DAK dan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Provinsi untuk Kabupaten/ kota;
- 3) Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
- 4) Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung dari pemerintah pusat;
- 5) Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa Konstruksi di Kabupaten Sragen;

- 6) Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi
- b. Ancaman (Threats)
- 1) Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian golongan C) sebagai bahan utama pendukung kegiatan konstruksi.
 - 2) Masih adanya penyedia jasa yang belum memenuhi standar pelayanan konstruksi
 - 3) Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah kabupaten
 - 4) Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung;
 - 5) Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - 6) Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai;

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur – unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur – unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman:

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK dan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Provinsi untuk Kabupaten/ kota.
2. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi, pemeliharaan, dan rekonstruksi, pembangunan, dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan;
3. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultasi dan perlindungan lingkungan;
4. Mengoptimalkan penanganan ruas – ruas jalan yang belum memenuhi standar jalan kabupaten dengan memanfaatkan alokasi APBN melalui dana DAK;
5. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian golongan C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
6. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/ jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang belum memenuhi standar;

7. Mengatasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk menanggulangi jauhnya jangkauan kerja yang tersebar di dalam wilayah kabupaten Sragen
8. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan Gedung;
9. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kualitas dan komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi;
2. Standar Operating Prosedure (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. Masih banyaknya kerusakan bangunan pengaman sungai;
4. Prosentase kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi;
5. Kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau;
6. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten.
7. Berkurangnya suplesi air irigasi pada beberapa daerah irigasi dan menurunnya kondisi bangunan irigasi;
8. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;
9. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman;
10. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya moratorium yang di lingkungan Aparatur Sipil Negara yang membuat sumber daya manusia masih kurang;
- b. Cuaca yang tidak menentu yang dapat menyebabkan perubahan iklim secara tidak terduga;

- c. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan bertambahnya kerusakan infrastruktur;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga infrastruktur milik negara.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagai berikut : **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan;
4. Menangani kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong.

Salah satu misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah Misi yang ke 5 yaitu **“Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong”**. Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tersedianya pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah perbatasan akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang sehingga dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawawan permukiman serta Pertanahan berperan agar infrastruktur di Kabupaten Sragen dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung industri, pertanian, pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum

dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen pada periode 2021–2026 yaitu Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah, tentunya juga dilandasi “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang infrastruktur kepada masyarakat dan bidang sarana bangunan Gedung. Adapun Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/ Wakil Bupati seperti Tabel 3.1 berikut :

No	Visi/Misi/Program Kerja Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong Misi : Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong	Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Adapun fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum antara lain: - Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; - Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	- Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten. - Berkurangnya suplesi air irigasi pada beberapa daerah irigasi dan menurunnya kondisi bangunan irigasi; - Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang aman; - Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak.	Faktor Penghambat: - Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan terhadap infrastruktur daerah - Laju kerusakan lebih tinggi dari tingkat laju penanganan. Pendorong : - Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK. - Adanya Aplikasi patriot memudahkan memonitor jalan yang harus segera ditangani

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arah penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan Program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang – undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Telaah terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3.1 Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sragen. Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah pada misi ke lima yaitu sebagai berikut : **“Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong”** Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Sragen 2021-2026,

melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan misi presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata Kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat adalah pada misi ke 2 yaitu Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur wilayah yang terpadu dan pada misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Renstra Kementerian PUPR	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Misi ke 2 yaitu Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infratsruktur wilayah yang terpadu Misi ke 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan	- Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; - Pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Pekerjaan Umum sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan; - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang Pekerjaan Umum	- Masih banyaknya kerusakan bangunan pengaman sungai; - Prosentase kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi; - Kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau; - Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten. Berkurangnya suplesi air irigasi pada beberapa	Faktor Penghambat: - Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan terhadap infrastruktur daerah; - Laju kerusakan lebih tinggi dari tingkat laju penanganan. Pendorong : - Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggara

	jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	sub urusan sumber daya air (SDA), sub urusan drainase dan sub urusan jalan;	daerah irigasi dan menurunnya kondisi bangunan irigasi;	an infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dengan alokasi dana APBN melalui dana DAK. b. Aplikasi PATRIOT
--	---	---	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan arah bagi pembangunan di Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka disusunlah dokumen RTRW sebagai acuan semua kegiatan pembangunan. Adanya keselarasan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dengan RTRW diharapkan dapat terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan.

Hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu produk perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen dengan rincian indikasi program yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN
- a. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan meliputi
- PKL (Pusat Kegiatan Lokal);
 - PKLp (Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan); dan
 - PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).

- a. Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

2) PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA

- a. Rencana pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Rencana sistem jaringan jalan dan jembatan.;
 - Jaringan Jalan Nasional
 - Jaringan Jalan Provinsi;
 - Jaringan Jalan Kabupaten;
 - Jaringan Jalan Lingkungan Dan Jalan Sekunder.
 - Jembatan.
- c. Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air
- d. Pengembangan system prasarana air baku dan irigasi
 - peningkatan pengelolaan DAS;
 - peningkatan pengelolaan Waduk Kedung Ombo,
 - peningkatan penanganan Sungai Bengawan Solo,
 - pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah berupa DI Colo Timur;
 - b) Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
 - c) Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten sebanyak 87 DI.
 - melakukan pembangunan embung untuk keperluan irigasi air baku dan pengendalian banjir di seluruh Kabupaten.
- e. Pengembangan prasarana air minum, pemanfaatan air permukaan, dan penggunaan air tanah.
 - peningkatan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan yang rawan kebutuhan air bersih;
 - pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air untuk air minum, air bersih, dan air untuk irigasi;
 - mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam secara proporsional.
- f. Perwujudan sistem prasarana drainase melalui program :

- pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional
- pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan –kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten
- normalisasi saluran primer
- normalisasi saluran sekunder berada di Kawasan Perkotaan

3) PERWUJUDAN SISTEM SARANA WILAYAH

- a. Rencana penyediaan sarana peribadatan (DPU bekerjasama dengan Bagian Kesra);
- b. Rencana penyediaan sarana perekonomian;
- c. Rencana penyediaan sarana olahraga dan rekreasi;
- d. Rencana penyediaan sarana pelayanan umum.

4) PERWUJUDAN POLA RUANG

- a. Perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Perlindungan kawasan perlindungan setempat.

5) PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA

- a. perwujudan kawasan pertambangan
 - identifikasi potensi tambang;
 - penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.
- b. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan
 - penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman dan peduli difabel;
 - mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;
 - penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.
 - pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu perwujudan “Kota Layak Anak” (DPU bekerjasama dengan Bagian Pemberdayaan perempuan)
 - penyediaan fasilitas pusat seni dan budaya
 - penataan dan penertiban reklame (DPU bekerjasama dengan Satpol PP, dan DP2D)

- Penataan dan pengembangan kawasan stadion olahraga terpadu
- c. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
 - pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 - mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 - a) pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL) ; dan
 - b) pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya.
 - c) penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

6) PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

- a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang (DPU bekerjasama dengan Bappeda, dan Badan LH); dan
- b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusannya terdapat banyak isu - isu strategis antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur antar wilayah belum merata, belum optimalnya penataan dan pengembangan kota;
2. Belum optimal pelayanan jaringan irigasi;
3. Pengelolaan sistem drainase belum optimal;
4. Akses Air minum aman masih sulit di beberapa wilayah;
5. Layanan pengolahan air limbah domestik belum optimal;
6. Beban angkutan kendaraan yang melebihi tonase yang dipersyaratkan;
7. Standar kualitas bangunan Gedung belum terpenuhi;
8. Tenaga kerja bersertifikat terampil masih kurang;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang mengandung makna tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh dinas atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan datang.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan berarti telah melakukan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan visi dan misi, isu-isu strategis yang telah dijelaskan pada bab yang terdahulu, maka terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen selama lima tahun kedepan yaitu **meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Sragen.**

1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen adalah **meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Sragen.**

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Kondisi Akhir
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatkan infrastruktur pekerjaan umum		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	76,45 %	77,66 %	78,2 %	79,07 %	79,61 %	80,14 %	80,14 %
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Indeksi infrastruktur bina marga dan sda Indeks keciptakaryaan	79,28 % 69 Indeks	79,99 % 73 Indeks	80,3 % 74 Indeks	80,61 % 76 Indeks	80,91 % 77 Indeks	81,22 % 78 Indeks	81,22 % 78 Indeks
		Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	77,91 %	79,11 %	79,71 %	80,31 %	80,91 %	81,51 %	81,51 %
		Persentase embung yang direhabilitasi	2,04 %	0,00 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %	8,16 %
		Persentase saluran irigasi yang direhabilitasi	0,86 %	1,08 %	0,58 %	0,57 %	0,32 %	0,58 %	3,13 %
		Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	68,01 %	71,11 %	72,61 %	74,21 %	76,01 %	77,71 %	77,71 %
		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Kondisi Baik	68,01 %	71,11 %	72,61 %	74,21 %	76,50 %	78,10 %	78,10 %
		Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	82,17 %	83,87 %	84,77 %	85,52 %	86,02 %	84,97 %	84,97 %
		Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL D) dalam kondisi baik	82,97 %	83,87 %	84,77 %	85,52 %	86,02 %	92,00 %	92,00 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik	50,55 %	55 %	57,50 %	60 %	63,40 %	65,20 %	65,20 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik	50,55 %	55,00 %	57,50 %	60,20 %	63,40 %	65,20 %	65,20 %
		Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik persentase layanan perijinan PBG dan SLF	74,88 % 100 %	78,50 % 100 %	81,90 % 100 %	86,10 % 100 %	86,70 % 100 %	87,10 % 100 %	87,10 % 100 %
		Jumlah dokumen IMB dan SLF	446 Dokumen	560 Dokumen	565 Dokumen	570 Dokumen	575 Dokumen	580 Dokumen	2850 Dokumen

		Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	74,88 %	80,40 %	83,90 %	85,40 %	87,40 %	89,40 %	89,40 %
		Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68,00 %	74,00 %	78,20 %	81,60 %	83,40 %	85,10 %	85,10 %
		Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68 %	70,00 %	73,00 %	75,00 %	76,50 %	78,10 %	78,10 %
		Persentase Jalan dalam kondisi mantap	80,64 %	80,86 %	80,89 %	80,9 %	81 %	81 %	81 %
		Persentase jalan kondisi mantap	80,64 %	80,86 %	80,89 %	80,90 %	80,91 %	80,92 %	80,92 %
		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	22,40 %	23 %	24,50 %	27,50 %	30,50 %	33 %	33 %
		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Terampil	22,40 %	0 %	24,50 %	27,50 %	30,50 %	33,00 %	33,00 %
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat Kinerja SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	B Predikat/Nilai (70,20)	BB) Predikat/Nilai	BB) Predikat/Nilai	BB (70,40) Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB (70,60) Predikat/Nilai	BB (70,60) Predikat/Nilai
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	B(70,10) Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB Predikat/Nilai	BB (70,60) Predikat/Nilai
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen
		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah pengadaan barang milik daerah	50 unit	39 unit	48 unit	24 unit	6 unit	19 unit	110 unit
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sragen, dirumuskan strategi perangkat daerah. Strategi perangkat daerah ini merupakan panduan dalam menentukan program perangkat daerah yang mendukung program unggulan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu diorientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang dituju, dan mendukung pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Sragen, maka ditetapkan arah kebijakan perangkat daerah sebagai acuan dan penentuan prioritas dan fokus perangkat daerah guna mendukung tercapainya visi dan misi bupati dan wakil bupati.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, dijabarkan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi	: Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong		
Misi 5	: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkannya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatkan / membangun infrastruktur di wilayah perbatasan	Melaksanakan peningkatan kapasitas/ pelebaran pada ruas jalan yang belum standar, jalan akses menuju kawasan industri dan perbatasan kabupaten
		Penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan	Penanganan ruas jalan kabupaten yang belum tuntas
		Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan kemendesakan	Melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik
		Membangun sistem layanan aman air minum dan sanitasi	Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sektor sumber daya air untuk pembangunan SPAM secara bertahap
		Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan	Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program air minum untuk perdesaan
		Membangun sistem layanan sanitasi layak	Melakukan sinkronisasi dengan APBN untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik.
		Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten Sragen	Melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Program

Program adalah program kerja dari dinas instansi pemerintah yang dijabarkan secara terinci langkah-langkah yang akan diambil untuk menjabarkan Kebijakan, juga didasarkan visi dan misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga program yang akan disusun merupakan strategis dari satuan kerja perangkat daerah.

Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

1.2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan tahunan dan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Dinas/instansi Pemerintah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Kegiatan tiap-tiap pembangunan adalah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh Dinas/instansi tersebut.

1.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur.

Dengan demikian indikator kinerja digunakan untuk menilai (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen telah menetapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti tertuang dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	SEKRETARIAT																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN- URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAr Kode 1.03.01					100%	21.673.903.818	100%									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.03.01.2.02	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	18.535.629,518	100%	18.535.629,518	200 orang	18.600.000	200 orang	18.600.000	200 orang	18.600.000	401 orang	92.871.259,036
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.03.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	211 orang	208 orang	201 orang	18.535.629,518	200 orang	18.535.629,518	200 orang	18.600.000	200 orang	18.600.000	200 orang	18.600.000	401 orang	92.871.259,036
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.03.02.1.01	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100%	100%	-	-	100%	101.328	5 dok	115.000	5 dok	115.000	5 dok	115.000	19 dok	335.132
	Penyusunan dok Perencanaan Perangkat Daerah 1.03.02.1.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok			-	-	4 dok	101.328	5 dok	115.000	5 dok	115.000	5 dok	115.000	19 dok	335.132
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 1.03.01.2.05	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	unit	100%	100%	100%	17.300	-	-								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1.03.01.2.05.01	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket			100 paket	17.300	-	-								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.03.01.2.06	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	100%	418.409	100%	597.098,6	100%		100%		100%		100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	paket			12 paket	26.250	12 paket	26.250	12 paket	28.950	12 paket	30.387	12 paket	31.900	60 paket	143.737

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	1.03.01.2.06.01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			21 paket	197.559	29 paket	358.298,6	10 paket	150.000	10 paket	150.000	10 paket	150.000	80 paket	1.005.857,6
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.03.01.2.06.04	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			12 paket	28.500	12 paket	52.000	12 paket	52.000	12 paket	52.000	12 paket	52.000	60 paket	236.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.03.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			12 paket	62.500	12 paket	63.350	12 paket	63.350	12 paket	63.350	12 paket	63.350	60 paket	315.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.03.01.2.06.06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12 dok	3.600	12 dok	7.200	12 dok	7.200	12 dok	7.200	12 dok	7.200	60 dok	32.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.03.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12 laporan	100.000	12 laporan	90.000	12 laporan	80.000	12 laporan	80.000	12 laporan	80.000	60 laporan	214.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.03.01.2.07	Persentase terpenuhinya barang milik daerah	%	100%	100%	100%	588.677	100%	1.577.940								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.03.01.2.07.02	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	unit			1 unit	562.292	2 unit	960.000								270.000
	Pengadaan Alat Besar 1.03.01.2.07.03	Jumlah pengadaan alat besar	unit					1 unit	550.000	2 unit	2.000.000		61.350		64.420		292.855
	Pengadaan Mebel 1.03.01.2.07.05	Jumlah mebeluer yang tersedia	unit					40 unit	49.676				416.745		437.583		1.989.228
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	unit			2 unit	26.385	3 unit	18.264	3 unit	20.000						

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	1.03.01.2.07.10	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.03.01.2.08	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	912.405	100%	435.964								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12 laporan	350.000	12 laporan	250.000	12 bulan	485.100	12 bulan	509.355	12 bulan	534.822		2.431.277
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.03.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12 laporan	562.405	12 laporan	185.964	12 bulan	915.075	12 bulan	960.830	12 bulan	1.008.000		4.585.405
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.03.01.2.09	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%	1.201.483,3	100%	1.074.292								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.03.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			30 unit	832.458,3	12 bulan	151.320	12 bulan	35.280	12 bulan	37.000	12 bulan	38.896		176.776
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.03.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			109 unit	89.090	110 unit	522.972	110 unit	165.375	110 unit	173.644	110 unit	182.325		828.844
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.03.01.2.09.03	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit			2 unit	100.000	5 unit	150.000	3 unit	231.525	4 unit	243.100	4 unit	255.256		1.160.381

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.03.01.2.09.09	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			1 unit	179,935	2 unit	250.000	2 lokasi	150.000	2 lokasi	150.000	2 lokasi	150.000		800.000
	BIDANG BINA MARGA																
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks Penyelenggaraan Jalan	%	80,64%	80,85	80,86%	63.102.793,401	80,89%	145.297.848	80,90%	37.000.000	80,91%	36.000.000	80,92%	43.000.000	80,92%	324.400.641,401
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kondisi mantap	%	80,64%	80,85	80,86%	63.102.793,401	80,89%	145.297.848	80,90%	37.000.000	80,91%	36.000.000	80,92%	43.000.000	80,92%	324.400.641,401
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dok reviu desain pembangunan jembatan	keg			2 Dokumen	50.000	5 Dokumen	631.148	10 Dokumen	950.000	10 Dokumen	950.000	10 Dokumen	950.000	37 Dokumen	3.531.148
2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya lahan pembangunan dan jembatan	Lokasi			1.432 M²	2.200.000	5.277 M²	4.068.245	2.600 M²	3.000.000	2.600 M²	3.000.000	2.600 M²	3.000.000	14.509 m²	15.268.245
3	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya dok leger jalan	dok			1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	105.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	5 Dokumen	505.000
4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Data kondisi jalan/jembatan	keg			-	-	2 Dokumen	510.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	8 Dokumen	1.110.000
5	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan kondisi rusak berat yang direkonstruksi	Km			3,46 KM	3.210.000	23,71 KM	71.104.019	16,79 KM	11.950.000	3,3 KM	4.600.000	3,3 KM	4.600.000	50,56 KM	95.464.019
6	Rehabilitasi Jalan	Jalan yang direhabilitasi	keg			2,52 KM	1.746.719,401	-	-	3 KM	1.500.000	1,2 KM	600.000	1,2 KM	600.000	7,92 KM	4.446.719,401
7	Pemeliharaan Berkalan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Km			28,34 KM	33.596.074	28,34 KM	47.026.700	5 KM	10.000.000	4 KM	8.000.000	4 KM	8.000.000	69,68 KM	106.622.774
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan dan jembatan yang diperbaiki dalam kondisi mantap	keg			2,37 KM	2.300.000	2,45 KM	5.000.000	2,35 KM	3.300.000	2,35 KM	3.300.000	2,35 KM	3.300.000	11,87 KM	17.200.000
9	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang	Unit			129,56 M	18.125.000	75 M	16.175.920	6 M	300.000	12 M	600.000	12 M	600.000	234,56 M	35.800.920

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
		dibangun															
10	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang dibangun	Unit			-	-	-	-	4 M	4.000.000	8 M	11.000.000	13 M	16.000.000	25 M	31.000.000
11	Pembangunan Underpass	Jumlah underpass yang dilebarkan	Unit			-	-	-	-			21,52 M	1.950.000	37,52 M	3.950.000	59,04 M	5.900.000
12	Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Unit			28,10 M	1.200.000	13,5 M	436.816	24,00 M	1.200.000	24,00 M	1.200.000	24,00 M	1.200.000	113,60 M	5.236.816
13	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	Unit			2,80 M	200.000	-	-	2,40 M	200.000	2,40 M	200.000	2,40 M	200.000	10 M	800.000
14	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah jalan/jembatan yang diawasi	Unit			7 Dokumen	375.000	3 Dokumen	240.000	6 Dokumen	300.000	6 Dokumen	300.000	6 Dokumen	300.000	28 Dokumen	1.515.000
	BIDANG SUMBER DAYA AIR																
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	(%)	77,91%	78,51%	79,11%	7.824.974	79,71%	5.011.612	80,31%	5.012.530	80,91%	3.013.398	81,51%	4.768.415,00	81,51%	25.630.929,00
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada D.I. Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Saluran Irigasi yang direhabilitasi	(%)	0,86%	1,18%	1,08%	8.334.974	0,58%	4.521.612	0,58%	4.472.530	0,33%	2.523.398	0,58%	4.478.415,00	3,14%	24.330.929,00
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	Daerah Irigasi			4 Daerah Irigasi	5.731.824	5 Daerah Irigasi	2.816.612	4 Daerah Irigasi	2.849.530	3 Daerah Irigasi	1.280.000	4 Daerah Irigasi	2.958.415,00	20 Daerah Irigasi	15.636.381,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan yang dilakukan	m			600 m	1.903.150	600 m	1.355.000	600 m	1.323.000	600 m	943.398	600 m	1.220.000,00	3000 m	6.744.548,00
3	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi yang dilakukan	Lokasi			1 Lokasi		2 Lokasi	100.000	1 Lokasi	50.000	1 Lokasi	50.000	1 Lokasi	50.000,00	5 Lokasi	250.000,00

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase embung yang direhabilitasi	Unit			1 Unit	700.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000,00	5 Unit	1.700.000,00
1	Penyusunan Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya yang tersusun	(%)	2,04%	0,00%	0,00%	190.000	2,04%	490.000	2,04%	540.000	2,04%	490.000	2,04%	540.000,00	8,16%	2.250.000,00
2	Jumlah Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen			1 Dokumen	50.000		-	1 Dokumen	50.000		-	1 Dokumen	50.000,00	3 Dokumen	150.000,00
3	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang dibangun	Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	50.000,00	5 dokumen	200.000,00
4	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Air tanah Untuk Air Baku yang Dibangun	Buah				-							1 Buah			-
5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhabilitasi	Buah					1 Buah	150.000	1 Buah	150.000	1 Buah	150.000	1 Buah	150.000,00	5 buah	600.000,00
6	Operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Operasi dan pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya yang dilakukan	Lokasi					1 Lokasi	50.000	1 Lokasi	50.000	1 Lokasi	50.000	1 Lokasi	50.000,00	5 lokasi	200.000,00
7	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah material yang digunakan untuk Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	m3			500 m³		500 m³	100.000	500 m³	100.000	500 m³	100.000	500 m³	100.000,00	2500 m3	400.000,00

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)		
				2020	2021												
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilakukan	Lembaga			2 Lembaga	30.000	2 Lembaga	30.000	2 Lembaga	30.000	2 Lembaga	30.000	2 Lembaga	30.000,00	10 lembaga	150.000,00
9	Evaluasi dan Rekomendaasi Teknis (REKOMTEK) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Evaluasi dan Rekomendaasi Teknis (REKOMTEK) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilakukan	Dokumen			4 Dokumen	110.000	4 Dokumen	110.000	4 Dokumen	110.000	4 Dokumen	110.000	4 Dokumen	110.000,00	20 dokumen	550.000,00
	BIDANG CIPTA KARYA																
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	71,11	10.612.645	72,61	11.695.000	74,21	10.560.000	76,50	9.890.000	78,10	10.023.000	78,10	52.780.645	71,11	10.612.645
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Kondisi Baik	%	71,11	10.612.645	72,61	11.695.000	74,21	10.560.000	76,50	9.890.000	78,10	10.023.000	78,10	52.780.645	71,11	10.612.645
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen (Perencanaan, Kebijakan, Strategi dan Teknis)	dokumen	2,00	101.000	2,00	125.000	2,00	110.000	2,00	110.000	2,00	110.000	10,00	556.000	2,00	101.000
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lokasi yang Disupervisi (lokasi)	lokasi	26,00	-	26,00	170.000	26,00	110.000	23,00	100.000	24,00	100.000	125,00	480.000	26,00	-
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Perkotaan	SR	15,00	30.000			100,00	550.000	100,00	500.000	100,00	520.000	315,00	1.570.000	15,00	30.000

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Perdesaan	SR	1.622,81	7.302.645									1.622,81	7.302.645	1.622,81	7.302.645
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Tersambung	SR	-	-	-	-							-	-	-	-
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Tersambung	SR	1.594,00	3.205.000	1.800,00	3.625.000							3.394,00	6.830.000	1.594,00	3.205.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Tersambung	SR	-	-	1.700,00	7.670.000	3.000,00	9.600.000	2.800,00	9.000.000	2.750,00	9.100.000	11.650,00	35.370.000	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum (kegiatan)	kegiatan	-	-	1,00		1,00	50.000	1,00	40.000	1,00	45.000	4,00	135.000	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - (kegiatan)	kegiatan	-	-	1,00		1,00	40.000	1,00	40.000	1,00	45.000	4,00	125.000	-	-
	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pokmas dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - (kegiatan)	kegiatan	1,00	75.000	1,00	400.000	1,00	85.000	1,00	85.000	1,00	85.000	5,00	730.000	1,00	75.000
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - (kegiatan)	kegiatan	-	-	1,00		1,00	15.000	1,00	15.000	1,00	18.000	4,00	48.000	-	-
															-		

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	%	83,87	3.697.416	84,77	6.360.246	85,52	5.290.750	86,02	5.448.000	92,00	5.845.500	92,00	26.641.912	83,87	3.697.416
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah/ Kabupaten Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL D) dalam Kondisi Baik	%	83,87	3.697.416	84,77	6.360.246	85,52	5.290.750	86,02	5.448.000	92,00	5.845.500	92,00	26.641.912	83,87	3.697.416
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	dokumen	8,00	-	10,00		8,00		8,00		2,00	6.000	34,00	6.000	8,00	-
	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang Diperbaiki (unit)	unit	-	-	-	-			-	-	1,00	200.000	1,00	200.000	-	-
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang Dibangun (unit)	unit	7,00	3.175.001	16,00	6.200.000	8,00	4.000.000	8,00	4.100.000	500,00	4.000.000	531,00	21.475.001	7,00	3.175.001
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Orang yang Dilatih	orang	-	-	50,00		50,00	12.500	50,00	13.000	50,00	15.000	200,00	40.500	-	-
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	orang	50,00		50,00		50,00	2.750	50,00	3.000	50,00	3.250	250,00	9.000	50,00	
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok yang Dilatih	kelompok	-	-	10,00		10,00	12.500	10,00	13.500	-	-	30,00	26.000	-	-
	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lokasi yang Disupervisi	lokasi	8,00		9,00		9,00	3.000	9,00	3.500	12,00	4.000	47,00	10.500	8,00	

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Terpusat Skala Permukiman																
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPAL yang Dibangun (unit)	unit	1,00	522.415	1,00	530.000	1,00	550.000	1,00	560.000	1,00	770.000	5,00	2.932.415	1,00	522.415
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Armada untuk Pengangkutan Lumpur Tinja (unit)	unit	-	-	1,00	530.000	1,00	575.000	1,00	600.000	1,00	625.000	4,00	2.330.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani (Rumah Tangga)	RT	-	-	360,00	57.600	370,00	65.000	400,00	80.000	425,00	72.250	1.555,00	274.850	-	-
	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana IPLT (unit)	unit			1,00	1.500.000			-	-	-	-	2,00	1.500.000		
	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah IPLT yang Dipelihara (unit)	unit	-	-	1,00	65.000	1,00	70.000	1,00	75.000	2,00	150.000	5,00	360.000	-	-
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluas an Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi (kegiatan)	kegiatan	-	-	1,00	100.000	-		-	-	-	-	1,00	100.000	-	-
															-		

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibangun	%	22,40	-	24,50	99.200	27,50	94.500	30,50	106.900	33,00	122.250	33,00	422.850	22,40	-
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Tenaga Konstruksi yang Terampil (kegiatan)	kegiatan	22,40		24,50	99.200	27,50	94.500	30,50	106.900	33,00	122.250	137,90	422.850	22,40	
	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Konstruksi yang Terampil (orang)	orang			2,00	27.000	2,00	30.000	2,00	32.500	2,00	35.000	10,00	124.500		
	Penyiapan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan tenaga instruktur/asesor (kegiatan)	kegiatan			1,00	10.000	1,00	12.000	1,00	14.000	1,00	16.000	5,00	52.000		
	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (dokumen)	dokumen			1,00	1.200	1,00	1.500	1,00	1.700	1,00	2.000	5,00	6.400		
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (kegiatan)				2,00	45.000	2,00	50.000	2,00	50.000	2,00	60.000	9,00	205.000		
	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (kegiatan)				1,00	500	1,00	500	1,00	600	1,00	650	5,00	2.250		
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (kegiatan)				1,00	500	1,00	500	1,00	600	1,00	600	5,00	2.200		

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (unit)				2,00	15.000	-	-	1,00	7.500	1,00	8.000	6,00	30.500		
															-		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah layanan perijinan PBG dan SLF	Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan / jumlah pemohon PBG dan SLF yg memenuhi pesyaratan x 100 %	560,00	250.000	565,00	210.000	570,00	220.000	575,00	230.000	580,00	240.000	2.850,00	1.150.000	560,00	250.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen IMB dan SLF		560,00	250.000	565,00	210.000	570,00	220.000	575,00	230.000	580,00	240.000	2.850,00	1.150.000	560,00	250.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi Teknis (Surat Pertimbangan Teknis) IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (dokumen)		560,00	250.000	565,00	210.000	570,00	220.000	575,00	230.000	580,00	240.000	2.850,00	1.150.000	560,00	250.000
															-		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung pemerintah kondisi baik/	80,40	51.763.286,3	83,90	119.290.164	85,40	17.770.000	87,40	11.824.000	89,40	37.635.000	89,40	238.282.450,3	80,40	51.763.286,3

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
			Jumlah bangunan gedung pemerintah x100%														
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wialayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Milik Pemerintah		80,40	52.255.736,3	83,90	119.290.164	85,40	17.770.000	87,40	11.824.000	12,00	37.635.000	40,00	238.774.900,3	80,40	52.255.736,3
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan DED, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah (dokumen)		10,00	1.881.470,00	9,00	1.565.000	5,00	17.000.000	4,00	11.000.000	12,00	15.000.000	40,00	46.446.470	10,00	1.881.470,00
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Perda dan/atau Perbub Terkait Bangunan Gedung (dokumen)				1,00			-	-	-	1,00	150.000	2,00	150.000		
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monev Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara (kegiatan)				5,00		5,00	20.000	4,00	24.000	5,00	50.000	19,00	94.000		
	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Jumlah Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret dalam Rangka Penertiban Sertifikat Laik Fungsi (kegiatan)		200,00	250.000	220,00	420.492	240,00	250.000	260,00	250.000	280,00	35.000	1.200,00	1.205.492	200,00	250.000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-			-	-	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	-	-

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
		(gedung)															
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (gedung)						1,00	500.000	1,00	550.000	12,00	2.400.000	16,00	3.450.000		
															-		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	70,00	492.450	73,00	491.040	75,00	1.705.000	76,50	1.515.000	78,10	1.985.000	78,10	6.188.490	70,00	492.450
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan)	kegiatan	70,00	492.450	73,00	491.040	75,00	1.705.000	76,50	1.515.000	78,10	1.985.000	372,60	6.188.490	70,00	492.450
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategii, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (dokumen)	dokumen	3,00	34.000	1,00	15.000	3,00	50.000	3,00	55.000	3,00	60.000	16,00	214.000	3,00	34.000
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota (lokasi)	lokasi	1,00	15.000	1,00	15.000	2,00	40.000	4,00	40.000	3,00	50.000	12,00	160.000	1,00	15.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan (lokasi)	lokasi	3,00	492.450			2,00	1.200.000	2,00	1.000.000	3,00	1.350.000	15,00	4.042.450	3,00	492.450
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (lokasi)	lokasi					2,00	400.000	2,00	400.000	2,00	500.000	7,00	1.300.000		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam	kegiatan	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan (kegiatan)															
	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (lokasi)	lokasi					2,00	15.000	3,00	20.000	3,00	25.000	9,00	60.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase Kondisi Baik	Panjang drainase dalam kondisi baik / Jumlah panjang drainase	62,50	710.000	64,30	2.255.000	65,80	2.010.000	67,20	2.775.000	68,80	3.155.000	68,80	10.905.000	62,50	710.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Saluran Drainase yang Tertangani (meter)		62,50	710.000	64,30	2.255.000	65,80	2.010.000	67,20	2.775.000	68,80	3.155.000	68,80	10.905.000	62,50	710.000
	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan		1,00	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	100.000	1,00	100.000
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen yang tersusun		1,00	75.000	-	-	-		-	-	-		1,00	75.000	1,00	75.000
	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tercapainya kegiatan yang sesuai dengan RKS		-	-	4,00	80.000	2,00	45.000	5,00	90.000	6,00	100.000	17,00	315.000	-	-
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem drainase perkotaan		-	-	1,00	500.000	1,00	400.000	1,00	600.000	1,00	600.000	4,00	2.100.000	-	-
	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Kualitas saluran drainase perkotaan		-	-	1,00	300.000	1,00	200.000	1,00	200.000	2,00	400.000	5,00	1.100.000	-	-
	Rehabilitasi Saluran Drainase	Terehabnya saluran		1,00	239.999,8	2,00	400.000	2,00	400.000	3,00	500.000	3,00	600.000	11,00	2.100.000	1,00	239.999,8

No	Program/keg/Sub keg	Indikator Program/ keg/Sub keg	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						2022		2023		2024		2025		2026			
				2020	2021	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)	T	Rp. (000)
	Perkotaan	drainase perkotaan															
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya sarana sistem drainase perkotaan		1,00	100.000	2,00	150.000	1,00	100.000	2,00	150.000	2,00	160.000	8,00	660.000	1,00	100.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya sistem drainase				1,00	200.000	1,00	250.000	1,00	250.000	1,00	250.000	4,00	950.000		
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Tercapainya kegiatan yang sesuai dengan RKS		1,00	15.000	4,00	75.000	4,00	75.000	5,00	75.000	5,00	80.000	19,00	320.000	1,00	15.000
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem drainase lingkungan		-	-	1,00	150.000	1,00	150.000	1,00	150.000	1,00	150.000	4,00	600.000	-	-
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Meningkatnya Kualitas saluran drainase lingkungan		-	-	2,00	150.000	1,00	150.000	2,00	200.000	2,00	250.000	7,00	750.000	-	-
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Terehabnya saluran drainase lingkungan		1,00	150.000	2,00	250.000	2,00	180.000	3,00	500.000	3,00	500.000	11,00	1.580.000	1,00	150.000
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan			-	-			1,00	60.000	1,00	60.000	1,00	65.000	3,00	185.000	-	-
	: Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan		1,00	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	70.000	1,00	70.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen dapat disajikan pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Kondisi Akhir
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatkan infrastruktur pekerjaan umum			Indeks infrastruktur pekerjaan umum	76,45 %	77,66 %	78,2 %	79,07 %	79,61 %	80,14 %	80,14 %
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum		Indeksi infrastruktur bina marga dan sda Indeks keciptakaryaan	79,28 % 69 Indeks	79,99 % 73 Indeks	80,3 % 74 Indeks	80,61 % 76 Indeks	80,91 % 77 Indeks	81,22 % 78 Indeks	81,22 % 78 Indeks
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	77,91 %	79,11 %	79,71 %	80,31 %	80,91 %	81,51 %	81,51 %
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase embung yang direhabilitasi	2,04 %	0,00 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %	8,16 %
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi yang direhabilitasi	0,86 %	1,08 %	0,58 %	0,57 %	0,32 %	0,58 %	3,13 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	68,01 %	71,11 %	72,61 %	74,21 %	76,01 %	77,71 %	77,71 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Kondisi Baik	68,01 %	71,11 %	72,61 %	74,21 %	76,50 %	78,10 %	78,10 %
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	82,17 %	83,87 %	84,77 %	85,52 %	86,02 %	84,97 %	84,97 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL D) dalam kondisi baik	82,97 %	83,87 %	84,77 %	85,52 %	86,02 %	92,00 %	92,00 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Kondisi Akhir
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	50,55 %	55 %	57,50 %	60 %	63,40 %	65,20 %	65,20 %
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	50,55 %	55,00 %	57,50 %	60,20 %	63,40 %	65,20 %	65,20 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik persentase layanan perijinan PBG dan SLF	74,88 % 100 %	78,50 % 100 %	81,90 % 100 %	86,10 % 100 %	86,70 % 100 %	87,10 % 100 %	87,10 % 100 %
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen IMB dan SLF	446 Dokumen	560 Dokumen	565 Dokumen	570 Dokumen	575 Dokumen	580 Dokumen	2850 Dokume n
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Bangunan Gedung pemerintah Dalam Kondisi Baik	74,88 %	80,40 %	83,90 %	85,40 %	87,40 %	89,40 %	89,40 %
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68,00 %	74,00 %	78,20 %	81,60 %	83,40 %	85,10 %	85,10 %
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Lingkungan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	68 %	70,00 %	73,00 %	75,00 %	76,50 %	78,10 %	78,10 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	80,64 %	80,86 %	80,89 %	80,9 %	81 %	81 %	81 %
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kondisi mantap	80,64 %	80,86 %	80,89 %	80,90 %	80,91 %	80,92 %	80,92 %
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	22,40 %	23 %	24,50 %	27,50 %	30,50 %	33 %	33 %
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Terampil	22,40 %	0 %	24,50 %	27,50 %	30,50 %	33,00 %	33,00 %

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Kondisi Akhir
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat Kinerja SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	B Predikat/ Nilai(70,20	BB) Predikat/ Nilai	BB) Predikat/ Nilai	BB (70,40) Predikat/ Nilai	BB Predikat/ Nilai	BB (70,60) Predikat/ Nilai	BB (70,60) Predikat/ Nilai
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	B Predikat/ Nilai (70,10	BB) Predikat/ Nilai	BB) Predikat/ Nilai	BB Predikat/ Nilai	BB Predikat/ Nilai	BB Predikat/ Nilai	BB (70,60) Predikat/ Nilai
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	50 unit	39 unit	48 unit	24 unit	6 unit	19 unit	110 unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen renstra yang terusun ini merupakan pedoman yang akan dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen selama lima tahun ke depan (2021-2026). Kepala Dinas Pekerjaan Umum merupakan penanggung jawab utama dan harus didukung oleh seluruh komponen pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen.

Dokumen ini bersifat strategis dan global yang masih perlu dijabarkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kinerja tahunan yang kemudian diuraikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pengusulan anggaran.

Keberhasilan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semua pihak yang terkait terutama pegawai Dinas Pekerjaan Umum di samping juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku.

8.2. Pedoman Transisi

Renstra ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen yang sebelumnya disahkan oleh Bupati Sragen. Renstra ini berlaku tahun 2021 sampai dengan 2026 dan akan tetap digunakan/berlaku sampai ditetapkannya renstra yang baru.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sragen

